

## BAB IV

### HIBRIDA LOKAL-GLOBAL PADA POLITIK KOMODIFIKASI BUDAYA *SERENTAUN* REKONSTRUKTIF, UPACARA TAHUNAN MASYARAKAT SUNDA, DI SINDANGBARANG KABUPATEN BOGOR

Industri pariwisata merupakan industri yang didominasi oleh standar dari pasar Barat dengan melihat budaya yang lain sebagai budaya yang berbeda, unik, eksotik, dibanding budaya dalam kehidupan turis sehari-hari. Globalisasi telah menguniversalkan cara melihat dan proses mengonsumsi budaya yang lain di bawah politik pasar modal. Akan tetapi ruang global ini juga dimanfaatkan oleh lokalitas untuk mengekspresikan budayanya, menunjukkan eksistensi budayanya. Lokalitas yang partikular dan Global yang universal keduanya bertemu dalam ruang ketiga yang tidak menjadi keduanya.

#### **4.1. Kontestasi Elit Lokal dalam *Serentaun* Rekonstruktif**

Industri pariwisata memotivasi penyusunan ulang upacara *Serentaun* yang semula sakral menjadi upacara yang superfisial. Perekonstruksian tersebut sejalan dengan upaya menemukan kembali sejarah Sunda di masa lampau, masa kerajaan Pakwan Pajajaran dan budaya Sunda di wilayah Bogor yang dulu pernah menjadi pusat kerajaan Pakwan Pajajaran. Akan tetapi dalam prosesnya politik lokalitas yang ingin memanfaatkan ruang global lewat pariwisata ini masih menghadapi berbagai benturan sesama elit lokal, meskipun kemudian menghasilkan kesepakatan-kesepakatan atau negosiasi.

#### 4.1.1. Kontestasi Elit Tradisi dan Elit Agama Pembaharu

Ketika upacara *Serentaun* kembali diselenggarakan secara besar-besaran oleh elit tradisi, kalangan masyarakat yang diprakarsai oleh elit agama Islam pembaharu tidak menyetujui perhelatan tersebut. Kalangan elit agama resisten terhadap *Serentaun* Rekonstruktif, karena upaya itu bertujuan melestarikan tradisi leluhur yang menurut mereka tidak sesuai dengan nilai ajaran Islam. Kalangan elit agama Islam pembaharu menyelenggarakan lagi upacara Sedekah Bumi dengan cara yang menurut mereka lebih sesuai dengan ajaran hukum Islam.

Beberapa ritus yang tidak disepakati dalam *Serentaun* Rekonstruktif yang bagi kalangan elit agama Islam pembaharu akan merusak ajaran Islam adalah penguburan kepala kerbau setelah dipotong, penggunaan dupa ketika mengadakan upacara meskipun membaca doa-doa dalam agama Islam sebagai pengganti mantera, mengadakan ziarah ke makam leluhur, dan kepercayaan terhadap Dewi Sri yang memberi berkah terhadap tanaman. Elit agama Islam pembaharu sebelum diadakan kembali *Serentaun* Rekonstruktif berusaha merepresentasikan budayanya yang berbeda dengan mengadakan upacara yang selama ini bagi masyarakat dianggap sebagai upacara Sedekah Bumi. Upacara tersebut tidak disertai dengan ritus selama berhari-hari, dan diselenggarakan dalam tata cara sederhana yang tidak menggunakan dupa, hanya pembacaan doa-doa, pengajian ditutup dengan pembagian kue-kue.

Negosiasi yang dilakukan oleh elit tradisi terhadap elit agama Islam pembaharu dibuktikan dengan kesungguhannya untuk memperkenalkan budaya Sunda dalam kesempatan pariwisata yang dijanjikan di masa depan akan memberi

kesejahteraan bagi masyarakat. Elit agama Islam pembaharu berusaha menegosiasikan kepentingan ajaran Islam yang diyakini benar, berusaha memasukkan wacana budayanya, dengan cara sebagian bergabung dengan elit tradisi. Elit agama Islam pembaharu memberi catatan untuk menghindari perbuatan syirik dalam *Serentaun* Rekonstruktif pada ritus penyembelihan kerbau bagian kepala tidak dikuburkan. Penguburan bagian-bagian dari hewan kurban tersebut hanya pada sesuatu yang tidak dapat lagi dimakan oleh manusia. Beberapa poin dalam ritus *Serentaun* Rekonstruktif, kalangan agama Islam pembaharu belum dapat mengubah tradisi tersebut, karena ada kalangan elit agama pro-tradisi yang membenarkan ritus tersebut.

#### **4.1.2. Kontestasi Elit Agama Islam Pembaharu dan Elit Agama Pro Tradisi**

Isu penggalan kembali budaya masa lampau Sunda sebagai wilayah bekas kerajaan Pakwan Pajajaran membuat kalangan elit agama memperdebatkan kembali metodologi penyampaian ajaran Islam di kalangan masyarakat. Elit agama Islam pro-tradisi berusaha mempertahankan metodologi lama yang diterapkan oleh Sunan Gunung Jati dan penyebar agama Islam di Sindangbarang di masa-masa awal kejatuhan Pakwan Pajajaran. Elit agama pro-tradisi dalam menyampaikan ajaran Islam masuk secara inklusif dengan tradisi masyarakat.

Salah satu inklusivitas metodologi penyebar agama Islam saat itu mengadakan perubahan penanggalan dan doa-doa dalam ritus upacara *Serentaun*. *Serentaun* yang awalnya dilaksanakan berdasarkan agama Sunda Wiwitan-Hindu-Buddha dengan

penanggalan Sunda pada tutup tahun dan menjelang tahun baru, setelah Islam masuk tetap diadakan dengan penanggalan yang berubah. *Serentaun* menjadi upacara memperingati tahun baru Islam dan doa-doa Islam mengganti mantera-mantera agama-agama sebelumnya.

Inklusivitas ini yang ingin dipertahankan oleh kalangan elit agama pro-tradisi. Kontestasi wacana antara elit agama pro-tradisi dengan elit agama Islam pembaharu yang ingin mengubah tradisi masyarakat yang masih syirik dan bidah<sup>14</sup> menurut keyakinan mereka, membuka kedinamisan budaya. *Serentaun* Rekonstruktif tetap diadakan dan negosiasi yang dilakukan oleh para elit agama Islam Pembaharu pada satu ritus yang berkenaan dengan penguburan kepala kerbau dan desakralisasi Dewi Sri sebatas penyebutan superfisial untuk tujuan pariwisata. Beberapa peralatan ritus upacara yang masih menjadi perdebatan adalah penggunaan dupa dan ritus ziarah ke makam leluhur. Bagian ritus yang sulit dihilangkan ini membuat elit agama Islam pembaharu tetap meneruskan wacana tandingan dengan suatu bentuk upacara Sedekah Bumi yang lain yang penyelenggaraannya tidak menggunakan dupa, sebatas pengajian lalu membagikan kue tanpa upacara yang panjang berhari-hari dan disertai arak-arakan.

---

<sup>14</sup> Syirik yaitu suatu perbuatan menyekutukan Tuhan yang dalam ajaran agama Islam dilarang. Tuhan bagi agama Islam adalah satu, Allah YME, yang tidak beranak dan tidak diperanakkan, seperti yang tercantum dalam surat Al-Alaq. Bidah dalam ajaran Islam masih menjadi perdebatan. (Lihat bab 3). Bidah yaitu perbuatan menambahkan sesuatu yang tidak diajarkan dalam Islam.

### **4.1.3. *Serentaun* Rekonstruktif Menuju Global dalam Kooptasi Elit Pemerintah**

#### **Daerah Pada Pembangunan Pariwisata**

Program kebudayaan daerah sebagai aset pariwisata pada era Suharto telah dilanjutkan pada era desentralisasi. Setiap daerah berusaha menggali, menemukan kembali tradisi khas daerah untuk tujuan pariwisata. Wacana pariwisata terinternalisasi dalam masyarakat, menjadi dengungan (*buzzword*), sekaligus harapan pada tingginya apresiasi masyarakat luas nasional maupun global terhadap kebudayaan mereka sehingga diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan.

Komodifikasi budaya rakyat *Serentaun* Rekonstruktif di Sindangbarang Kabupaten Bogor tidak terlepas dari proyek pembangunan pariwisata nasional yang diturunkan pada pemerintah daerah. Di Sindangbarang *Serentaun* yang sudah ada sejak zaman Pakwan Pajajaran, perhelatannya kembali secara besar-besaran sejak elit tradisi memprakasai pengadaan upacara tersebut dan mendatangkan banyak pengunjung tahun 2005. Pemerintah daerah Kabupaten Bogor melihat fenomena tersebut sebagai potensi yang dapat mendatangkan pendapatan.

Pariwisata sebagai bagian dari industri internasional menjadi satu sistem yang menghibridakan kebudayaan-kebudayaan lokal dan global. Kebudayaan yang telah dikomodifikasi dalam pasar telah berubah dalam suatu pergerakan politik ekonomi di bawah program-program organisasi kapitalisme global. Posisi kebudayaan lokal memanfaatkan arus globalisasi untuk menyatakan diri di samping menginginkan keuntungan ekonomi. Antara ekspresi kebudayaan lokal, apresiasi masyarakat global,

terciptanya sarana dan prasarana, menyebabkan hubungan timbal balik yang kompleks.

## **4.2 Hibrida Lokal-Global *Serentaun* Rekonstruktif Pada Industri Pariwisata**

### **Global**

Pada sub-bab ini akan dijelaskan keterkaitan *Serentaun* Rekonstruktif sebagai salah satu produk pariwisata di Kabupaten Bogor dengan proyek pariwisata berskala global melalui pembangunan sarana dan prasarana yang menunjang program tersebut. Sub-bab ini juga menjelaskan bagaimana signifikansi pariwisata menghibridakan dua kutub lokal-global menjadi tidak keduanya.

#### **4.2.1. Teknologi Internet Menjembatani Lokal-Global**

Beberapa situs internet memberitakan pemuatan gambar-gambar tentang *Serentaun* Rekonstruktif di Sindangbarang. Situs-situs tersebut ada yang milik pribadi, milik media *online*, dan milik pemerintah daerah. Milik pribadi dan media *online* lebih variatif dengan fitur-fitur penarasian yang ekspresif tentang Kampung Budaya Sindangbarang dan upacara *Serentaun* Rekonstruktif dengan memuat foto-foto yang dibuat oleh pengunjung yang mengapresiasi upacara tersebut.

Situs dalam internet menjadi penanda berpindahnya ruang lokalitas yang semula hanya lokalitas secara harfiah menjadi lokalitas imajiner. Lokalitas secara geografis Sindangbarang sebagai masyarakat transisi yang sehari-harinya bertemu secara langsung bertatap muka, terikat kekeluargaan yang kuat, jarang berpindah

ke wilayah lain, menjadi potret masyarakat Sindangbarang yang dapat dilihat orang lain dari jarak yang telah kabur. Masuknya lokalitas secara geografis ini dalam ruang global teknologi informasi menjadikan keberadaan Sindangbarang yang kampung dalam posisi hibrida.

Kecanggihan media informasi mengkonstruksi *Serentaun* dan Kampung Budaya Sindangbarang di lain pihak membenarkan dominasi pasar yang mengkonstruksi orang seakan berkebudayaan lain dalam melihat budaya Sunda di Sindangbarang. Nostalgia yang ditawarkan pada brosur wisata ke Sindangbarang bermakna nostalgia terhadap keasrian Kampung Budaya yang didirikan di tengah persawahan, kaki Gunung Salak, dan lain-lain yang dianggap eksotik oleh kalangan yang meyakini keeksotikan budaya untuk dikonsumsi. Keeksotikan adalah cara melihat diri (*self*) terhadap yang lain (*other*), yang berbeda dengan dunia yang melihat.

Kebudayaan tradisional yang direpresentasikan dalam situs internet memenuhi selera pasar masyarakat modern yang mengaggap citra tradisional dalam brosur tersebut sebagai sesuatu yang beda atau yang lain dari kehidupan sehari-hari masyarakat modern. Konstruksi industri pariwisata yang menanamkan citra tradisional dan modern menghasilkan keuntungan ekonomi yang dapat dilipatgandakan. Henry Levebre (1994), mengatakan citra masyarakat modern adalah kerja profesional, *free time* dan *compulsive time*<sup>15</sup>. *Free time* digunakan oleh

---

<sup>15</sup> Lihat Levebre (1994), yang menggambarkan rutinitas sehari-hari masyarakat modern yang dibentuk sebagai masyarakat pekerja di bawah kendali industri. Profesionalitas dibangun berdasarkan birokrasi

masyarakat industri modern sebagai waktu untuk mengisi diri dengan kesenangan atau istirahat yang tidak juga lepas dari kontrol industri. Waktu istirahat dikomodifikasi dengan tawaran-tawaran kesenangan pada paket-paket wisata termasuk wisata budaya tradisional yang di dalamnya mengangkat pola kehidupan berbeda.

#### **4.2.2. Politik Global Dalam *Serentaun* Rekonstruktif Melalui Transnasionalisasi<sup>16</sup> Modal**

Kecenderungan pemerintah daerah pada kapitalisasi budaya yang dimulai sejak adanya politik bantuan dari PBB melalui UNDP, menurut Dahles, yang mengutip Gunawan (1977: 48) dan diturunkan ke propinsi-propinsi di seluruh Indonesia menandai masuknya perdagangan bebas ke ruang budaya sebagai bagian

---

yang dikonsepsikan Weber dengan tujuan efisiensi yang melahirkan spesifikasi kerja. *Compulsive Time* merupakan waktu untuk melakukan pekerjaan berulang-ulang, sedangkan *Free Time* merupakan waktu istirahat disela-sela waktu kerja misalnya hari Minggu atau cuti yang diberikan dalam masa kerja.

<sup>16</sup> Korporasi transnasional didefinisikan oleh Masao Miyoshi (1996: 86-87) sebagai istilah yang dapat ditukar-tukar dengan multinasional, sebab jika istilah keduanya dibedakan, tetap dua nama tersebut pengertiannya lebih kurang pada tingkat alienasi asal negara-negara pada bisnis internasional. Miyoshi menjelaskan perdagangan internasional secara bertahap, pertama, perusahaan-perusahaan domestik secara sederhana menangani aktivitas ekspor-impor yang berhubungan dengan pedagang lokal. Kemudian perusahaan mengambil alih distribusi ke luar negeri dan akhirnya, perusahaan transnasional mendenasionalisasi operasi perusahaan dengan memindahkan keseluruhan sistem bisnis termasuk modal, sumber daya manusia, riset dan pengembangan. Hubungan negara-negara ASEAN dengan beberapa organisasi negara-negara lain menurut Miyoshi adalah salah satu bentuk transnasional. Operasional korporasi transnasional terdiri dari karyawan-karyawan yang beragam etnis dan negara yang dituntut lebih loyal kepada perusahaan daripada negara atau etnis. Miyoshi mengemukakan bahwa sektor-sektor yang melibatkan industri transnasional salah satunya yang terbesar adalah pariwisata dan hiburan.

dari politik ekonomi produksi-konsumsi. Sektor-sektor pariwisata yang kemudian diserahkan kepada sektor swasta dengan melakukan deregulasi terhadap aktivitas ekspor, seperti potongan tarif, insentif pajak, dan kemudahan prosedur ekspor telah membuka gerbang untuk persaingan industri budaya.

Beberapa korporasi telah masuk dalam pembangunan pariwisata di Kabupaten Bogor yang berhubungan dengan sarana dan prasarana pariwisata. Sektor pariwisata bekerja sama dengan sektor perhubungan, menangani pembangunan jalan dan angkutan, juga memperkuat keamanan daerah, pelayanan medis, serta suplai air bersih. Sedangkan yang berhubungan langsung adalah penyediaan penginapan-penginapan dari hotel berbintang hingga wisma-wisma termasuk rumah-rumah tradisional dalam eko-wisata, tempat-tempat makan, dan sarana-sarana hiburan lain seperti sarana olahraga, kesenian, dan kegiatan-kegiatan rekreasional lain yang menawarkan paket wisata pada waktu luang (*leisure time*).

Pendapatan dari sektor pariwisata di Kabupaten Bogor membuat banyak pengusaha mempertimbangkan keuntungan yang diperoleh dari sektor ini. Jumlah objek pariwisata sebanyak 50 objek di Kabupaten Bogor, yang terdiri dari wisata alam, sejarah, dan budaya, 13 objek dikelola oleh swasta, sisanya BUMN seperti Perhutani untuk wisata wana, PTP Nusantara untuk wisata agro, dan Pemda. Pengusaha-pengusaha lain yang terlibat dalam kepariwisataan dan telah mendapat izin antara lain usaha penyedia jasa tour dan travel, sarana olahraga dari billiar, golf, hingga sirkuit, hall untuk olahraga *in door*, dan usaha jasa di bidang kesehatan, kecantikan, panti pijat, restoran, rumah makan dan perhotelan.

*Serentaun* rekonstruktif sebagai produk yang dikomodifikasi menjadi representasi budaya lokal yang masuk ke lingkup global dengan jumlah pengapresiasi yang meningkat. Tahun 2007 menurut data dari dinas pariwisata Kabupaten Bogor, di Sindangbarang pengunjung yang datang adalah 297 wisatawan Nusantara, 6.600 wisatawan asing. Anggaran dana bagi pariwisata di Sindangbarang didapat dari pemerintah daerah tingkat II dan Propinsi dari Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Pembangunan pariwisata pada lingkup kecil di Sindangbarang merupakan bagian dari pembangunan pariwisata dalam sekup besar di tingkat daerah Jawa Barat dan nasional. Pada tingkat nasional kebijakan-kebijakan pariwisata dibuat berdasarkan kerjasama yang terangkum dalam perjanjian-perjanjian antar negara ASEAN, dan organisasi antar negara lain terutama yang berkenaan dengan dana bantuan pembangunan. Perjanjian-perjanjian tersebut menghasilkan beberapa kerja sama bidang perdagangan pariwisata. Di ASEAN ada beberapa organisasi antara lain *ASEAN Tourism Agreement (ATA)* yang mendukung program liberalisasi perdagangan dan jasa di negara-negara Asia Tenggara dan *ASEAN Tourism Forum (ATF)* yang mengurus promosi wisata antar dan intra ASEAN serta membangun pusat-pusat pariwisata di pasar internasional. (www. Deplu.go.id, 22 Juni 2008). Pembangunan pariwisata yang melibatkan berbagai organisasi dunia dalam bentuk pinjaman modal dan investasi lembaga keuangan dunia termasuk dalam pengertian korporasi transnasional (TNCs).

Globalisasi melalui perjanjian liberalisasi perdagangan menekan pemerintah nasional sehingga memunculkan UUPMA 2007 yang memudahkan syarat-syarat

masuknya modal asing. Sikap pemerintah nasional dengan UUPMA 2007 yang satu sisi membuka kemudahan investasi asing tetapi sekaligus ingin menguatkan keberadaan usaha kecil-menengah sebenarnya menjadi berstandar ganda, dan tidak memihak kesejahteraan rakyat, meskipun keluarnya UUPMA terbaru tersebut dapat dimengerti sebagai bentuk tekanan pasar internasional untuk menerjang batas-batas negara. Posisi negara yang lemah dihadapan pasar ini membuat kebijakan pemerintah pusat melalui UUPMA 2007 lebih berat pada penguasaan sektor-sektor pariwisata di tangan pengusaha asing. Proyek-proyek strategis seperti bisnis travels yang menyediakan paket-paket tour dari tiket pesawat, hingga guide, pengelola hotel berbintang, sarana olahraga seperti golf, bilyar, dan tempat-tempat hiburan seperti panti pijat, karaoke, klub malam dan lain-lain tetap dikuasai oleh kalangan pemodal besar yang didanai oleh lembaga keuangan internasional seperti TNCs.

Pada masa otonomi daerah, ketika modal asing dapat langsung bersentuhan dengan daerah, hal yang paling membahayakan adalah keberadaan negara-bangsa. PMA melalui TNCs dapat menjadi imperialis baru yang memanfaatkan perbedaan etnis, suku, agama, dan aliran agama di daerah-daerah sama seperti pemerintah kolonial Belanda memanfaatkan daerah-daerah di wilayah Nusantara pra-Indonesia. *World Trade Tourism* yang bekerja sama dengan UNDP, sebagai badan internasional, mengkonstruksi pariwisata dengan aturan-aturan keaslian, keeksotikan budaya yang dapat dikonsumsi oleh penikmat berkebudayaan lain. Keuntungan dari keeksotikan budaya ini menjadi perebutan bangsa-bangsa satu rumpun, pertarungan daerah-daerah satu bangsa mengklaim siapa yang lebih asli dengan kebudayaan apa.

#### **4.2.3 Politik Lokalitas Menghadapi Globalisasi**

Budaya lokal sebagai aset pembangunan pariwisata yang pernah menjadi salah satu andalan dalam pertumbuhan ekonomi nasional pada tahun 1990-an merupakan hibridisasi budaya lokal yang harusnya di bawah identitas nasional Indonesia pada perputaran politik ekonomi global. Pada masa pasca-reformasi lokalitas bermunculan di tingkat global tanpa ada pengendalian dari pemerintah nasional. Pengendalian kebudayaan lokal ini terjadi pada masa Orde Baru ketika masih memegang kendali pembangunan terpusat di seluruh sektor. Penelitian Dahles (2000) membuktikan bahwa pembangunan pariwisata adalah paket penjualan kebudayaan daerah-daerah di bawah Indonesia sekaligus bentuk pengontrolan kebudayaan-kebudayaan lokal. Satu sisi kebudayaan daerah mendapat perlindungan dari percampuran dengan kebudayaan asing, tapi di sisi lain proyek modernisasi melalui pembangunan termasuk pariwisata menghegemoni kebudayaan lokal agar tidak terlalu kuat.

Pembangunan pariwisata budaya pada konferensi internasional pariwisata budaya dan masyarakat lokal di Yogyakarta tahun 2006 bertujuan mengurangi kemiskinan masyarakat lokal, begitu menurut menteri Kebudayaan dan Pariwisata, Jero Wacik, dengan cara mengeksplorasi tantangan dan potensi wisata budaya untuk menciptakan lapangan kerja. Menteri tersebut juga mencontohkan Yogyakarta. Padahal sebenarnya keberhasilan tersebut bukan keberhasilan program pemerintah masa Orde Baru. Pembangunan wisata budaya di Yogyakarta berhasil menurut Dahles (2000) dan Dahles (1999) disebabkan oleh tumbuh pesatnya sektor-sektor

informal yang awalnya justru tidak diperhitungkan. Kehadiran “pariwisata jalanan” (*Streetside Tourism*) dan pariwisata “kampung” (*Kampung Tourism*) membangun dua dunia, menguasai ranah terpisah yang diorganisasi oleh institusi yang berbeda untuk turis dengan kategori dan kebutuhan akan fasilitas yang berbeda misalnya turis-turis yang memilih untuk menjadi *backpacker* atau *hippy traveller*. Pada kasus di Yogyakarta tidak semua turis menginginkan sarana mewah dengan perlakuan khusus seperti yang diduga pemerintah. Pertama dengan alasan menghemat biaya, kedua ingin mendapatkan sesuatu yang tidak biasa, yang tidak ditawarkan oleh biro-biro perjalanan, seperti kehidupan masyarakat di wilayah-wilayah kampung dalam gang sempit. Kemunculan usaha-usaha kecil dari masyarakat yang menyediakan tempat menginap dengan fasilitas sederhana, makanan tradisional, guide-guide kampung yang tidak berlisensi disebabkan oleh dominasi pembangunan pariwisata yang diperuntukkan bagi kalangan bermodal seperti hotel Ambarukmo, Sheraton, dan lain-lain.

Politik kebudayaan era Suharto dengan menggunakan spirit Bhinika Tunggal Ika menjadikan budaya Indonesia sebagai aset keunikan yang dapat dijual sekaligus membangun citra Indonesia sebagai sebuah bangsa yang utuh terintegrasi meskipun memiliki begitu banyak perbedaan-perbedaan dari berbagai suku bangsa dan agama. Citra itu dimuseumkan dalam pembangunan Taman Mini Indonesia Indah, menjadi kebanggaan yang dimitoskan seakan kebudayaan Indonesia dari berbagai daerah merupakan sesuatu yang baku dan statis. Pengenalan puncak-puncak budaya daerah sebagai budaya terbaik Indonesia pada masa Suharto meminggirkan budaya-budaya

lain. Hampir di setiap daerah hanya budaya terbaik yang diakui sebagai budaya Indonesia, seperti budaya terbaik yang sering disebut Bali dan Yogyakarta. Pada akhirnya dalam daerah-daerah itu juga memunculkan budaya-budaya tandingan disadari atau tidak disadari. Penelitian Dahles (2000) melihat upaya penertiban wilayah tujuan wisata dalam pembangunan fasilitas-fasilitas seperti hotel, jalur-jalur perdagangan, jalur-jalur wisata, *guide*, di daerah Yogyakarta, tidak mampu membendung derasnya *guide* liar, pedagang-pedagang kaki lima dan kendaraan-kendaraan tertentu yang justru menjadi realitas tersendiri dalam masyarakat yang budayanya diadiluhungkan.

Kebudayaan pinggir biasanya kebudayaan rakyat yang tumbuh dari kebiasaan rakyat sehari-hari. Rakyat kebanyakan juga mempunyai kebiasaan tertentu seperti upacara yang biayanya ditanggung bersama. Pada masa sekarang baru terlihat berbagai macam upacara yang keberadaannya ditonjolkan untuk tujuan pariwisata. Hampir semua rakyat kalangan bawah mempunyai perhelatan upacara. Nelayan, petani bahkan petani tebu memiliki upacara tersendiri. Salah satu upacara dari kebudayaan masyarakat agraris di Jawa Barat adalah *Serentaun*. Upacara itu eksis di masyarakat hampir selama petani itu sendiri ada, bahkan ketika upacara *Serentaun* di Cigugur, Kabupaten Kuningan, dilarang pada zaman Suharto, karena kepercayaan di luar 5 agama tidak diakui, keberadaan budaya tersebut tidak musnah. Ia terus eksis dalam bentuk yang lain yaitu agama Katolik. Mempertahankan keberadaan dengan cara masuk ke dalam agama besar tersebut menarik minat pengunjung untuk mengapresiasi. Begitu juga *Serentaun* di Ciptagelar, Banten Girang, Banten Selatan,

pada saat pengunjung mulai berdatangan pemerintah daerah mulai memanfaatkan adat budaya masyarakat setempat demi tujuan pariwisata. Penggalan kembali sejarah Sindangbarang, rekonstruksi *Serentaun* bagian dari revitalisasi kebudayaan setempat juga menjadi alat bermain dalam arena pembangunan pariwisata dunia yang tak bisa ditolak. Desakralisasi budaya masyarakat menjadi salah satu produk yang dikalkulasikan dengan jumlah angka orang yang mengapresiasi, penambahan atau pengurangan atraksi seni, dikontrol sesuai standar organisasi seperti *World Tourism Organization*

Revitalisasi budaya Sunda di Sindangbarang dengan penanda *Serentaun* Rekonstruktif meskipun dimotivasi pariwisata, mempunyai harapan dapat menemukan kembali kearifan lokal seperti yang masih berlaku pada masyarakat di Ciptagelar. Kearifan lokal merupakan khazanah kekayaan budaya masyarakat yang sekarang ini diangkat sebagai bagian dari alternatif pemecahan masalah lingkungan dan sosial. Jika pada masa lalu dalam sejarah *Serentaun*, sinkretisme *Sunda Wiwitan-Hindu-Buddha* dapat dilakukan masyarakat Sunda kuna karena adanya motif yang sama pada sistem pemujaan terhadap Dewi Sri<sup>17</sup> dan diyakini dapat menyejahterakan masyarakat setempat.

---

<sup>17</sup> Pemujaan pada dewi kesuburan ada hampir di seluruh tempat yang mata pencarian penduduknya berbasiskan pertanian. James (1959: 168 ) dalam Santiko (1977: 295) mengemukakan bahwa patung dewi ibu pada masyarakat agraris dari tanah liat bakar yang bentuknya hampir sama dengan patung “Venus” dijumpai mulai dari Asia Minor sampai Lembah sungai Sindhu, Mesir, Pulau Kreta dan sebagainya. Upacara Seren Taun ini juga sudah dilakukan sejak masa kerajaan Pajajaran bahkan dimungkinkan sebelum pra-Hindu-Buddha dengan inti pemujaan terhadap dewi kesuburan.

Pemujaan dewa-dewa yang semula pada agama lokal tidak mengenal nama dewa menjadi ada dengan meniru dewa-dewa dalam agama Hindu Buddha. Dewa yang dipuja dalam *Serentaun* adalah Sri dan Kuvera. Pemujaan dewa-dewa ini tidak sekedar teologis saja tapi berimplikasi pada praktik keseharian penyimpanan padi-padi yang dianggap Kuvera-Sri ini pada lumbung. Lumbung ini bagian dari kehidupan sosial yang menunjukkan berjalannya perekonomian masyarakat demi kesejahteraan bersama. Lumbung ini pada masa lalu terbuat dari bahan-bahan alam yang ada pada masyarakat setempat agar dapat melindungi padi sebelum dimakan dalam waktu berbulan-bulan. Padi-padi yang disimpan dalam lumbung dapat digunakan sewaktu-waktu ketika datang masa paceklik, atau dipinjamkan pada siapa saja yang membutuhkan. Simbolisasi memulangkan padi—Sri dan Kuvera--ke alam atas dengan memasukkan ke lumbung dalam ritus *Serentaun* bermakna kehidupan alam atas tempat manusia kembali dapat ditempuh dengan menjalankan kehidupan sosial kepada sesama manusia di dunia, yaitu menjalankan sistem perekonomian yang adil dan menciptakan kesejahteraan bersama.

Tetapi kearifan lokal di titik tertentu bisa menjadi batas yang membahayakan jika berlebihan yaitu adanya euforia kemunculan tradisi-tradisi masa lampau yang berhubungan dengan kegemilangan masa pra-Indonesia. Tradisi tersebut menjadi bagian dalam politisasi kebudayaan lokal di dalam percampuran berbagai anasir agama dan budaya yang diartikulasikan dalam *Serentaun* Rekonstruktif.

Revitalisasi yang digerakkan oleh elit tradisi mengangkat kembali nama Pakwan Pajajaran, masa pra-Indonesia, yang ingin disejajarkan dengan kebudayaan

Jawa di Yogyakarta yang pernah dijadikan kebudayaan adiluhung pada masa Suharto. Ini tidak masalah jika bukan terjadi karena imbas politik puncak-puncak budaya pada rezim Orde Baru dan pengistimewaan kebudayaan Jawa khususnya Jawa Tengah— sisa-sisa peninggalan Mataram, sebagai yang “berbudaya” membekas dalam ingatan kolektif masyarakat. Keinginan untuk diakui, diapresiasi menjadi motif kuat bagi kalangan elit tradisi yang hidup pada bekas wilayah kerajaan Pakwan Pajajaran ini dengan merekonstruksi budaya *Serentaun* sebagai milik masyarakat petani masa lampau.

*Serentaun* Rekonstruktif menjadi alat menyuarakan keberadaan masyarakat Sunda di Sindangbarang, Bogor, terhadap dominasi budaya Sunda Priangan, dominasi budaya Jawa, dan dominasi modernisasi pembangunan, ketika upacara ini telah lepas menjadi produk budaya yang dikomodifikasi dalam penanganan pemerintah daerah. Pembangunan pariwisata dijadikan arena yang tampak “natural” terhadap suatu kepentingan politik identitas Sunda Bogor.

Kebudayaan Sunda Bogor yang dianggap pinggir, karena berbahasa Sunda kasar dalam tata kebahasaan Sunda yang bertingkat-tingkat, *Undak Usuk*, disangkal oleh masyarakat Sunda Bogor yang diprakarsai oleh elit tradisi bahwa sebenarnya bahasa Sunda egaliter. Bahasa Sunda yang selama ini direpresentasikan sebagai bahasa Sunda ber-*Undak Usuk* merupakan bahasa Sunda yang terpengaruh oleh kerajaan Mataram yang pernah menguasai wilayah Jawa Barat setelah Pakwan Pajajaran runtuh atas serangan Banten, Demak dan Cirebon. Argumentasi elit tradisi merujuk pada penggunaan *Undak Usuk* bahasa Sunda mulai tersebar setelah

pemerintah Belanda membuka sekolah-sekolah dasar dan menengah di seluruh Jawa Barat. Argumentasi itu diperkuat dengan merujuk pada Ben Anderson yang menemukan bahwa adanya campur tangan kolonial dalam pengkonstruksian bahasa Jawa dan Sunda bertingkat-tingkat. Benedict Anderson<sup>18</sup> meneliti tingkat-tingkat bahasa Jawa sebagai bentuk pembungkaman pada usaha-usaha perlawanan terhadap otoritas kolonial dalam kekuasaan raja-raja Jawa. Penemuan ini kemudian digunakan oleh elit-elit intelektual dan budayawan Sunda dalam memandang tradisi Sunda Priangan yang feodal.

Representasi Sunda Bogor yang merujuk pada Sunda keturunan Pakwan Pajajaran juga dihadirkan dalam peralatan *Serentaun* Rekonstruktif melalui busana. Busana ini berbeda dengan yang digunakan oleh Sunda Priangan yaitu blankon dan stelan jas yang terpengaruh oleh Mataram Islam. Busana yang ditampilkan dalam *Serentaun* rekonstruktif adalah ikat kepala seperti yang digunakan oleh orang Baduy. Akan tetapi pariwisata mengubah ikat kepala yang berwarna hitam seperti yang digunakan orang Baduy menjadi batik hitam di atas dasar kain putih. Pariwisata juga mengubah paradigma baju yang digunakan yang semula adalah komprang yang seharusnya setelan hitam-hitam menjadi celan hitam dengan baju atasan putih. Tujuan diubahnya warna busana ini untuk menekankan pada keterbukaan, dan estetika yang menyesuaikan standar warna yang dipahami masyarakat umum, meskipun dalam

---

<sup>18</sup> Lihat Benedict Anderson. 1996. "Sembah-Sumpah: Politik Bahasa dan Kebudayaan Jawa" dalam Bahasa dan Kekuasaan Politik Wacana di Panggung Orde Baru, Yudi Latif dan Idi Subandi Ibrahim (edt), Mizan Pustaka.

filosofi Sunda warna hitam yang digunakan oleh masyarakat Sunda Pakwan Pajajaran masa lalu adalah warna kesucian.

#### **4.2.4. Kecenderungan dalam Tarik-Menarik Hibrida Lokal-Global**

Hibrida lokal-global telah menghasilkan sesuatu yang baru yang tidak murni lokal dan global. Lokalitas telah beralih pada ruang global lewat teknologi informasi yang mengiklankan pariwisata Sindangbarang. Ini berarti bahwa lokalitas telah lepas dari lokal yang nyata secara geografis menuju lokal imajiner yang global di dunia internet. Pasar modal milik perusahaan-perusahaan transnasional dalam globalisasi yang harusnya menguniversalkan *Serentaun* Rekonstruktif sebagai hanya produk dagang menjadi tercampur dengan perhatian baru pada pesatnya ekspresi budaya lokal Sunda pada masyarakat luas.

Komodifikasi *Serentaun* yang berasal dari tradisi masyarakat lokal membuat upacara tersebut bersifat terbuka untuk dilihat yang lain. Keterbukaan ini memberi peluang keuntungan budaya, dikenalnya cara pandang masyarakat Sunda dihadapan budaya lain sehingga mengurangi kecurigaan heterophobia oleh kalangan berbudaya lain. Upacara-upacara sejenis yang masih sakral di beberapa daerah dilindungi dengan suatu peraturan ketat yang melarang pengunjung mengganggu bahkan mengambil foto prosesi upacara.

Di Sindangbarang *Serentaun* yang rekonstruktif dalam beberapa ritual seperti berziarah di makam leluhur, mengambil 7 mata air suci dan mendoakannya semalam dalam acara *ngangkat* bersifat khusuk dan sakral bagi orang-orang yang terlibat di

dalamnya. Upacara tersebut bersifat terbuka bagi masyarakat umum untuk melihat satu persatu ritual yang diselenggarakan. Pengunjung boleh memotret setiap momen dalam upacara selama tidak melanggar kesopanan. Di Sindangbarang upacara sejenis *Serentaun* Rekonstruktif tersebut masih diselenggarakan masyarakat di beberapa Rukun Tetangga yang menginginkan upacara bersifat sakral dengan nama Sedekah Bumi. Selain itu Sindangbarang juga menyimpan berbagai peninggalan keagamaan nenek moyang (*karuhun*), *Sunda Wiwitan*, yaitu batu-batu tradisi megalitikum. Antara budaya masyarakat sehari-hari baik yang berdasarkan pada nilai-nilai agama masyarakat sekarang yaitu tradisi Islam, tradisi islam yang bercampur dengan tradisi *karuhun*, peninggalan-peninggalan historis masa Kerajaan Pakwan Pajajaran, semua seharusnya mendapat hak yang sama dalam perlindungan budaya lokal termasuk budaya masyarakat dalam mata pencaharian baik itu yang mempertahankan pertanian maupun karya-karya penduduk dalam industri rumah tangga sepatu.

Perlindungan budaya lokal sebagai bagian yang masih sakral dan yang telah direkonstruksi menjadi kewajiban pemerintah nasional dan daerah. Tidak semua budaya lokal dapat dibuka di ruang global. Bagi pemerintah daerah dan nasional dualisme menghadapi globalisasi tidak saja penting sebagai bentuk negosiasi yang bersifat penyangkalan terhadap dominasi pasar modal. Dalam dualisme tersebut satu pihak pemerintah wajib melindungi budaya lokal agar tetap lestari. UUD 1945 pasal 32 menurunkan peraturan Menteri Dalam Negeri No.39 tahun 2007, yang berisi bahwa dalam rangka menyelenggarakan otonomi daerah, pemerintah daerah mempunyai kewajiban melindungi masyarakat, menjaga persatuan, kesatuan dan

kerukunan nasional, keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta melestarikan nilai sosial budaya. Kepala daerah mempunyai tugas mengupayakan pengembangan dan pelestarian sosial budaya di daerah. Upaya melestarikan dan mengembangkan tradisi adat budaya di daerah merupakan bagian dari langkah untuk memelihara ketahanan budaya bangsa sebagai pilar dari ketahanan nasional.

Kebijakan pemerintah daerah untuk melindungi budaya-budaya lokal dicanangkan bersamaan dengan kesadaran masyarakat dunia pada kerusakan lingkungan dan punahnya beberapa budaya berbagai etnis akibat modernisasi. Di bidang pariwisata kemudian diangkat isu pariwisata berdasarkan lingkungan dengan sebutan eko-pariwisata tahun 1990. Menurut aturan dalam Ekowisata, salah satu prinsip yang diangkat adalah penghormatan terhadap adat dan budaya masyarakat tujuan pariwisata yang disebut dengan *cultural sensitivity* atau sensitivitas budaya. Keberadaan wisata budaya menurut eko-turisme mendorong timbulnya penghormatan dan apresiasi terhadap adat istiadat dan keragaman budaya untuk menjamin kelangsungan budaya lokal. Tetapi penghormatan yang membebaskan budaya-budaya lokal untuk tujuan penjualan budaya menggiring pada persoalan euforia eko-turisme sehingga program ini tidak kritis terhadap persoalan-persoalan lain dalam hal pembagian keuntungan.

Di lain pihak dibukanya wilayah-wilayah di daerah dalam bisnis budaya yang melintas batas, memudahkan masuknya budaya-budaya global ke tataran masyarakat. Meminjam bahasa Dahles, ia menyebut persoalan ini sebagai dilema pariwisata. Pada tataran tersebut tidak masalah jika pemerintah daerah lebih cenderung atau berpihak

pada kesejahteraan budaya dan masyarakat lokal dalam pertemuan lokal-global di dalam ruang ketiga hasil tarik menarik oposisi biner tersebut. Seperti pada penjualan *Serentaun* Rekonstruktif, pemerintah daerah seharusnya lebih memperhatikan kesejahteraan masyarakat pemilik budaya tersebut dengan memotivasi kembali kemandirian masyarakat lewat kewirausahaan. Ini lebih penting dari pada mendengungkan keotentikan demi kelangsungan ideologi unik pariwisata yang pengaturan pembangunannya lebih condong pada politik ekonomi kapitalis dengan membuka seluas-luasnya investasi asing untuk pengembangan pariwisata.

Pengembangan pariwisata berstandar ekologi yang tata aturannya berasal dari WTO yang terlihat perduli pada kelestarian budaya dan pemberdayaan ekonomi masyarakat setempat, kenyataannya tetap memposisikan masyarakat lokal berada di bawah bayang-bayang ekonomi perdagangan bebas yang tergantung pada kekuatan modal. Pemilik budaya lokal *Serentaun* Rekonstruktif diposisikan sebagai objek yang diangkat identitas budayanya tetapi tidak memiliki hasil budayanya sendiri.

Data pendapatan asli daerah Kabupaten Bogor yang berasal dari sektor pariwisata tahun 2006-2007 yang diambil dari sumber potensi daerah adalah dari Rp. 21.498.851.579 menjadi 24.883.834.749 atau naik 15.74% digunakan untuk peningkatan usaha objek wisata, usaha hiburan umum, usaha jasa wisata, usaha sarana akomodasi, usaha sarana makan-minum, pelatihan pelaku usaha, pelatihan pengembangan SDM dinas, pelestarian budaya, pengiriman misi kesenian dan pasangiri atau perlombaaan seni Sunda. Keberadaan usaha-usaha sektor pariwisata di Kabupaten Bogor tahun 2007 menurut potensi Kabupaten Bogor, menyerap tenaga

kerja sebanyak 13.061 orang, sementara jumlah pengangguran di Kabupaten Bogor masih 12,5% dari jumlah penduduk yang lebih dari 4 juta jiwa. Hal ini menjadi bukti bahwa pembangunan sektor wisata belum banyak memberikan kontribusi pada kesejahteraan rakyat. Angka tersebut merupakan tenaga kerja formal, sedangkan tenaga kerja informal tidak terdata.

Menurut pemerintah daerah pembangunan wisata justru menyerap tenaga kerja informal. Walaupun demikian ini tetap menjadi pertanyaan, tentang berapa keuntungan yang diperoleh tenaga kerja informal tersebut dibanding keuntungan yang didapat oleh perusahaan-perusahaan dengan modal besar baik itu dari investasi asing atau investasi dalam negeri. Jumlah unit koperasi usaha menengah di Kabupaten Bogor seperti yang dicatat oleh Harian Umum Pelita, pada tahun 2007 sebanyak 1400-an unit. Jumlah tersebut yang membutuhkan suntikan dana sebanyak 500-an UKM. Sedangkan usaha yang dikelola perusahaan besar di bidang pariwisata secara formal baru menyerap tenaga kerja 13.061 jiwa. Angka yang sangat kecil dibanding jumlah pengangguran yang ada di Kabupaten Bogor yang dicatat koran Pelita (30 Mei 2008) yakni sebanyak 459.000 jiwa. UKM berdasarkan sifatnya yang lebih elastis, dalam suatu usaha masyarakat seharusnya dapat membantu mengurangi angka pengangguran. UKM telah diberi dana dari perbankan, BUMN, pemerintah daerah setempat, dan PMA sebagai mitra. Ketidakmampuan UKM seperti yang dikeluhkan dalam surat kabar HU Pelita, 30 Mei 2008, adalah kurangnya modal dan rendahnya kualitas SDM. Jumlah seribu empat ratus UKM dibanding jumlah penduduk di Kabupaten Bogor tidak menunjukkan keberhasilan UKM, pemerintah

dan pihak-pihak yang seharusnya mendorong kemandirian masyarakat melalui UKM termasuk di dalamnya penanam modal asing.

Keberpihakan pemerintah daerah pada korporasi asing terbukti dengan perubahan UUPMA 2007 yang isinya lebih membuka kesempatan bagi para penanam modal asing melaksanakan aktivitas usaha di Indonesia. Salah satu butir dalam UUPMA 1967/70 mengatur tenaga kerja dalam Bab IV, tenaga kerja asing tidak mudah untuk didatangkan karena tenaga kerja asing hanya boleh didatangkan bagi jabatan-jabatan yang belum dapat diisi dengan tenaga kerja warga Indonesia. Kebijakan yang dibuat oleh pemerintahan Orde Baru tersebut mempertimbangkan pertumbuhan perusahaan-perusahaan Indonesia yang dikelola “pribumi”—konglomerat-konglomerat yang dekat dengan kekuasaan Suharto.<sup>19</sup> Hal ini tidak berlaku lagi dalam UUPMA 2007 karena tenaga kerja asing lebih mudah masuk ke Indonesia. Pada pasal 10, tenaga kerja warga Negara Indonesia tetap diutamakan, tetapi investor tetap memiliki hak menggunakan tenaga ahli WNA untuk jabatan dan keahlian tertentu .

Pembangunan pariwisata di Kabupaten Bogor menurut laporan program Dinas Pariwisata Kabupaten Bogor yang tercatat dalam potensi daerah, dan Data Inventarisasi UKM di Kabupaten Bogor dari Kantor Konperasi Unit Usaha Kecil Menengah, terbagi dalam empat zona wisata, yaitu Zona Puncak, Zona Bogor Barat,

---

<sup>19</sup> Lihat Richard Robinson dan Vedi R. Hadiz (2004) yang mengatakan bahwa kebijakan ekonomi Suharto pada masa kekuasaannya melindungi perusahaan-perusahaan keluarga dan teman-temannya untuk melakukan monopoli terhadap perusahaan-perusahaan di dalam negeri. Akan tetapi setelah adanya reformasi dari Bank Dunia dengan isu-isu korupsi yang dibawa oleh negara-negara pemberin dana seperti CGI, IMF, keluarga Suharto dan teman-temannya beralih pada bisnis keuangan di dalam pasar modal , global serta mega proyek infrastruktur dan kebutuhan publik.

Zona Bogor Utara dan Zona Bogor Timur. UKM di zona wisata yang banyak mendatangkan wisatawan baik asing maupun Nusantara yaitu Zona Wisata Bogor Timur, dengan 2 objek wisata, Mekarsari dan Penangkaran Rusa. Jumlah wisatawan yang berkunjung adalah 2.179.961 wisatawan. Daerah ini menurut laporan dari Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah, mempunyai 75 UKM. Tetapi di daerah lain seperti Zona Puncak yang mempunyai banyak objek wisata dan fasilitas seperti hotel, restoran, rumah makan hanya mempunyai sedikit sekali UKM. Kecamatan Megamendung mempunyai 25 rumah makan, 9 restoran, 12 fasilitas baik hotel, sarana olahraga, panji pijat dan lain-lain, tetapi hanya mempunyai 2 UKM. Kecamatan Cisarua yang mempunyai 15 restoran, 43 rumah makan, 17 fasilitas hotel dan sebagainya, hanya memiliki 5 UKM. Di Kecamatan Tamansari tidak terdata jumlah rumah makan, restoran dan fasilitas lain. Kecamatan yang masuk Zona Wisata Bogor Barat ini mempunyai 12 UKM dengan hanya 3 objek wisata, yaitu Sindangbarang, Buper Sukamantri dan Curug Nangka di Gunung Salak.

Tiga UKM yang terletak di kecamatan Taman Sari tersebut tidak terletak di Sindangbarang. Desa Pasir Eurih. Di dukuh Sindangbarang dan Menteng saat ini tidak tercatat mempunyai UKM. Beberapa tahun lalu ada beberapa koperasi perusahaan pertanian maupun kerajinan sepatu. Karena kurangnya pendampingan, koperasi tersebut sudah tidak berjalan lagi. Setelah wilayah ini dijadikan daerah destinasi wisata, budaya *Serentaun* dijual, kondisi matinya koperasi usaha masyarakat tersebut tidak bisa terus menerus dibiarkan.

Posisi pengrajin sepatu yang sudah eksis sejak tahun 1960-an—jauh sebelum Sindangbarang menjadi destinasi wisata-- tidak mendapat perhatian pemerintah daerah. Unit-unit usaha kecil tersebut dapat bertahan dengan modal masing-masing yang terbatas. Keterbatasan modal pengrajin industri sepatu membuat usaha mereka sebagian terpaksa bekerja sama dengan pemberi modal yang sifatnya perseorangan dengan sistem yang kurang menguntungkan di pihak pengrajin industri rumah tangga sepatu. Beberapa sumber dari penduduk setempat mengatakan bahwa industri rumah tangga ini sebenarnya adalah pabrik besar pengusaha yang bukan penduduk Sindangbarang dengan memanfaatkan industri rumah tangga. Dengan tidak mendirikan pabrik besar secara *de Jure*, pemodal-pemodal tersebut terbebas dari pajak. Selama ini pajak usaha dibebankan pada rumah tangga-rumah tangga industri dengan besar uang sesuai dengan penghasilan per tahun. Padahal keuntungan yang diterima pemodal tersebut jauh lebih besar dari keuntungan pengrajin sepatu di bengkel-bengkel rumah tangga.

Setelah Sindangbarang dijadikan kawasan destinasi wisata seharusnya pemerintah daerah lebih memperhatikan keberadaan industri rumah tangga sepatu ini dengan memberi dana lagi ke masyarakat untuk mendirikan unit-unit koperasi usaha dengan pelatihan dan pendampingan selama beberapa tahun, hingga masyarakat pengrajin industri rumah tangga ini dapat mandiri. Ketergantungan sebagian pengrajin pada penanam modal “liar” tersebut merugikan masyarakat dan pendapatan daerah, karena tidak terdeteksi untuk dipungut pajak usaha.

Dengan berbagai masalah yang terjadi pada UKM menggiring suatu pertanyaan bagaimana sebenarnya membangun program kemandirian masyarakat yang efektif bagi masyarakat lokal. Program pembangunan untuk menciptakan kewirausahaan masyarakat kecil menengah atau UKM sebenarnya juga berdasarkan konsep yang tidak memihak pada masyarakat Indonesia. Sindhunata (2000) yang mengutip penelitian Boeke, menyebut budaya bisnis masyarakat Indonesia kebanyakan lebih dekat kepada bisnis yang berdasarkan *social needs* daripada *economic needs*. Sementara basis pembangunan mental kewirausahaan seperti yang diberikan pada pelatihan-pelatihan UKM adalah kewirausahaan berdasarkan *economic needs* yang menggunakan logika perkembangan. Logika itu sendiri mempunyai motif keinginan manusia yang tak kenal batas, sehingga pusat dari kebutuhan ekonomi adalah individu yang tidak harus dikaitkan dengan pembatasan sosial masyarakat. Logika ini bertentangan dengan budaya masyarakat kebanyakan di Indonesia yang bersifat sosial, sehingga sebanyak apapun UKM didirikan dengan pelatihan-pelatihan kewirausahaan yang canggih tetap sulit diserap dengan maksimal. Sebagai contoh, dikatakan dalam UUPMA 2007, PMA sebagai mitra yang mendorong berkembangnya unit usaha kecil dan menengah, tetapi dalam beberapa kasus pada akhirnya UKM menjadi PMA, karena keterdesakan UKM sehingga harus menjual saham terbesarnya pada PMA. Sistem persaingan kewirausahaan berdasarkan kewirausahaan yang tidak sesuai dengan kultur kewirausahaan masyarakat lokal, membuat UKM bagaimanapun tidak dapat bersaing dalam pasar. UKM pada sektor pariwisata biasanya hanya memegang industri rumah tangga

souvenir, makanan, kesenian rakyat dan sebagainya yang artinya keuntungan terbesar tetap dipegang oleh perusahaan-perusahaan transnasional yang memegang kunci strategis industri pariwisata. Pemihakan pemerintah pada korporasi transnasional lewat mudahnya prosedur penanaman modal asing dalam UUPMA 2007 memberi sedikit pada masyarakat lokal. Komodifikasi *Serentaun* Rekonstruktif dalam lokal-global ini menghasilkan keantaraan sebagai budaya baru yang dalam tarik menariknya ternyata lebih cenderung pada dominasi satu kutub. Tujuan pembangunan pariwisata awalnya untuk menyejahterakan masyarakat, tujuan tersebut telah gagal, karena keuntungannya jatuh lebih banyak pada korporasi swasta yang bermodal besar.